



Available online at journal.unhas.ac.id/index.php/HJS

HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)

Volume 3, Issue 1, 2021

P-ISSN: 2685-5348, E-ISSN: 2685-4333

Dampak Proses Resettlement Area Vilages Terhadap Perubahan Sistem Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kampung Tanah Merah Kabupaten Teluk Bintuni)

*The Impact of The Resettlement Area Vilages Process on
The Changes of Social Economic Systems of The Community
(Studies on The Community of Tanah Merah Village, Teluk Bintuni Regency)*

Yotam Senis¹

¹Dosen Sosiologi Fisip Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia,
Email: papuaman2002@yahoo.com

ARTICLE INFO

How to Cite:

Senis, Y. (2021). Dampak Proses Resettlement Area Vilages Terhadap Perubahan Sistem Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kampung Tanah Merah Kabupaten Teluk Bintuni). *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 3(1), 40-58.

Keywords:

Resettlement Area Villages, Change, Systems, Socio-Economics

Kata Kunci :

Resettlement Area Vilages, Perubahan, Sistem, Sosial Ekonomi

ABSTRACT

BP LNG Tangguh is a Multi-National Corporation that is currently exploring liquid natural gas (liquid natural gas) in Teluk Bintuni Regency, West Papua Province. The presence of BP LNG Tangguh in Teluk Bintuni Regency has been in effect since 2002 until now. Kampung Tanah Merah is one of several villages in Bintuni Bay that is affected by the operational activities of BP LNG Tangguh because the area is used as the location for the construction of a gas refinery. The construction of liquefied natural gas refinery in the Tanah Merah Village area is one of the key reasons for BP Tangguh to relocate Tanah Merah people from their old village to the new selected location. The selection of location for the Tanah Merah people was carried out based on the agreement of various parties by determining a location of 200 hectares next to Saengga River which is area of Saengga Village. BP Tangguh facilitates all processes of movement people of Tanah Merah starting from the construction of settlements, infrastructure and facilitating the process of displacement. The movement of the Tanah Merah community from the old village to the new village certainly caused problems where the location chosen did not have the potential for both agricultural land and fishing areas for the community. The people of Tanah Merah experienced changes in socio-economic conditions because before being relocated they worked as shrimp catchers with sufficient income for them. After being moved to their new village they could no longer catch shrimp but they were forced to work as farmers. Soil condition and land area provided for agricultural location are inadequate so that they do not provide good agricultural products for the community. This condition because people cannot adjust to work as farmers and as result they experience decrease their income level.

ABSTRAK

BP LNG Tangguh adalah salah satu *Multi National Corporation* yang saat ini melakukan kegiatan eksplorasi gas alam cair (*liquid natural gas*) di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Kehadiran BP LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni terhitung sejak tahun 2002 hingga saat ini. Kampung Tanah Merah adalah salah satu dari beberapa kampung di Teluk Bintuni yang terkena dampak dari kegiatan operasional BP LNG Tangguh karena areal tersebut dijadikan sebagai lokasi pembangunan kilang gas. Pembangunan kilang gas alam cair di areal Kampung Tanah Merah menjadi salah satu alasan kunci bagi BP Tangguh untuk merelokasi warga Tanah Merah dari kampung mereka ke lokasi baru yang dipilih. Pemilihan lokasi bagi masyarakat Tanah Merah dilakukan berdasarkan persetujuan dari berbagai pihak dengan menentukan lokasi seluas 200 Ha disebelah Kali Saengga yang merupakan wilayah Kampung Saengga. BP Tangguh memfasilitasi semua proses perpindahan penduduk mulai dari pembangunan pemukiman, sarana pra sarana dan memfasilitasi proses perpindahannya. Perpindahan masyarakat Tanah Merah dari kampung lama ke kampung baru tentunya menimbulkan permasalahan dimana lokasi yang dipilih tidak memiliki potensi baik lahan pertanian maupun areal melaut bagi masyarakat. Masyarakat mengalami perubahan pada kondisi sosial ekonomi karena sebelum direlokasi mereka bekerja sebagai nelayan penangkap udang dengan penghasilan yang sangat cukup bagi mereka. Setelah dipindahkan ke kampung baru mereka tidak lagi dapat menangkap udang namun mereka dipaksa bekerja sebagai petani. Kondisi tanah dan luasan lahan yang disediakan untuk lokasi pertanian tidak memadai sehingga tidak memberikan hasil pertanian yang baik bagi masyarakat. Masyarakat tidak dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan sebagai petani dan sebagai akibatnya mereka mengalami penurunan tingkat pendapatan. .

1. PENDAHULUAN

Sebelum dimekarkan menjadi satu kabupaten definitif, Teluk Bintuni merupakan wilayah administratif dari Kabupaten Manokwari, yaitu Distrik Bintuni dan pada tahun 2002 barulah Teluk Bintuni dimekarkan menjadi sebuah kabupaten difinitif. Kabupaten Teluk Bintuni merupakan suatu kawasan yang memiliki kekhasan tersendiri di banding kawasan-kawasan lain di Papua. Kekhasan tersebut tergambar pada gugusan hijau hutan mangrove sepanjang pesisir pantai dan hampir pada setiap pulau di kawasan tersebut. Dengan luasnya potensi hutan mangrove Teluk Bintuni menyimpan berbagai macam sumber daya alam yang sangat mendukung kehidupan manusia.

Kampung Tanah Merah adalah bagian dari wilayah administratif Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni. Merupakan suatu kawasan dataran rendah, sungai dan delta. Wilayah kampung yang merupakan wilayah pesisir dengan komposisi hutan pantai, hutan mangrove, nipah, dan hutan sagu campuran. Wilayah yang memiliki akses jalur laut dan transportasi laut menjadi andalan dalam memberikan akses kepada semua aspek kehidupan masyarakat. Kawasan ini di diami oleh suku Sumuri pada bagian selatan Teluk Bintuni dengan pola hidup yang mencirikan masyarakat pesisir (masyarakat maritime) dengan karakter lingkungan alamnya. Mencari ikan, menangkap udang dan pangkur sagu merupakan pola hidup dan aktifitas sehari-hari yang dikerjakan oleh masyarakat adat Suku Sumuri.

Setelah Teluk Bituni dimekarkan menjadi kabupaten baru, dan dengan potensi kekayaan alam yang melimpah, hal ini dipandang sebagai porspek ekonomi dan merupakan satu kesempatan bagi masuknya perusahaan multi nasional. BP LNG Tangguh Indonesia adalah salah satu dari beberapa lembaga ekonomi internasional (MNC), merupakan rekanan pemerintah dalam pengembangan usaha MIGAS berskala internasional. Selain BP Tangguh dalam pengembangan usaha MIGAS juga terdapat beberapa perusahaan pemegang HPH dan perusahaan pengolahan hasil laut yang juga beroperasi dalam eksploitasi hasil hutan dan hasil laut di Bintuni.

Suku Sumuri adalah salah satu dari tujuh suku besar masyarakat adat Teluk Bintuni yang mendiami Kampung Tanah Merah. Beberapa kampung yang dimasukkan dalam DAV adalah Kampung Tanah Merah, Kampung Saengga dan Kampung Tofoi. Namun yang menjadi fokus adalah penduduk asli Tanah Merah yang terkena dampak langsung kegiatan operasional BP LNG Tangguh. Maksud dari terkena dampak langsung adalah perpindahan lokasi hunian/kampung dari Kampung Tanah Merah Lama ke Kampung Tanah Merah Baru. Perpindahan yang terjadi sebagai akibat dari lokasi Kampung Tanah Merah lama akan di bangun Area Pabrik BP LNG Tangguh.

BP Tangguh dalam mengeksekusi semua rencana operasionalnya, melakukan beberapa seminar dan workshop dalam menggalang opini publik. Maksud dari penggalangan opini publik adalah untuk dijadikan sebagai bahan acuan guna mencari solusi dalam resettlement area village bagi penduduk Tanah Merah. Hasil konsultasi debat publik yang dicapai kemudian dijadikan sebagai sebuah konsensus antara pihak perusahaan dan masyarakat dalam mendukung proses operasional BP LNG Tangguh. Akan tetapi dalam implementasinya mengalami perubahan dari standart operasional yang sudah disepakati berdasarkan hasil konsultasi publik. Sebab dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan bahwa kondisi masyarakat mengalami transformasi nilai-nilai sosial ekonomi dan budaya yang jauh berbeda dari yang sebelumnya ketika masih di kampung lama.

Transformasi yang dimaksudkan disini adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat dari perpindahan masyarakat Kampung Tanah Merah yang sebelumnya mendiami area yang dibangun pabrik kilang gas alam. Kampung Tanah Merah saat ini merupakan *resettlement area* yang dijadikan sebagai aglomerasi atau perkembangan wilayah dalam kawasan tertentu. Yang dimaksud dengan perkembangan wilayah tertentu adalah bahwa kampung yang ada saat ini merupakan kawasan pemukiman atau perkampungan yang perkembangan dan pembangunannya berada dalam DAV (*direct area village*), daerah khusus yang terkena dampak langsung proyek BP. LNG Tanggu dan masuk dalam wilayah operasionalnya.

Max Weber berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur (dalam buku *Sociological Writings*). Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Macionis (1987:638) menjelaskan perubahan sosial sebagai transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola pikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu. Penjelasan ini memberikan satu gambaran umum bahwa perubahan sosial adalah suatu kondisi yang terjadi sebagai akibat dari perubahan organisasi sosial masyarakat secara eksternal dan internal akibat perubahan lingkungan sosial dan budaya. Perubahan sosial yang terjadi secara faktor internal dan eksternal berdampak pada perubahan terhadap sistem kemasyarakatan, ekonomi (mata pencaharian), agama, kesenian, pendidikan, dan bahasa. Artinya bahwa disana terbentuk pola atau nilai-nilai yang diadopsi dari perubahan yang terjadi kemudian ditransformasikan menjadi nilai-nilai budaya yang baru. Perubahan sosial itu sendiri mengalami satu proses transformasi dalam satu waktu dan membutuhkan proses penyesuaian.

Farley (1990:626) menjelaskan perubahan sosial sebagai perubahan perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Penjelasan Farley tentunya sejalan dengan Macionis bahwa sesungguhnya menggambarkan kondisi yang terjadi di Masyarakat Kampung Tanah Merah. Kehadiran perusahaan raksasa ini secara besar-besaran membawa perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Alasannya bahwa struktur-struktur sosial ekonomi masyarakat banyak mengalami pergeseran nilai-nilai dan relasi-relasi sosial yang dibangun dalam masyarakat adat. Perubahan yang terjadi kian memberi dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat, dimana hak-hak ulayat masyarakat dikuasai sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Perubahan yang saat ini terjadi pada masyarakat Kampung Tanah Merah adalah sebagai akibat dari kepentingan ekonomi kapitalis. Masyarakat dalam kearifan lokal budayanya harus mengalami suatu proses yang disebut dengan *migrasi terpaksa*.

Piotr Sztompka (2004:4) perubahan sosial setidaknya memberikan pengaruh pada perubahan sistem dalam masyarakat yang apabila dipisahkan menurut komponen dan dimensinya maka perubahan yang terjadi adalah:

1. Perubahan komposisi (misalnya, migrasi dari satu kelompok ke kelompok lain, menjadi satu anggota kelompok tertentu, pengurangan jumlah penduduk karena kelaparan, demobilisasi gerak sosial, bubarnya satu kelompok).
2. Perubahan struktur (misalnya, terciptanya ketimpangan, kristalisasi kekuasaan, munculnya ikatan persahabatan, terbentuknya kerja sama atau hubungan kompetitif).

3. Perubahan fungsi (misalnya, spesialisasi dan diferensiasi pekerjaan, hancurnya peran ekonomi keluarga, diterimanya peran yang di indoktrinasi oleh sekolah atau universitas).
4. Perubahan batas (misalnya, penggabungan beberapa kelompok oleh kelompok lain, mengendurnya kriteria keanggotaan kelompok dan demokratisasi keanggotaan, dan penaklukan).
5. Perubahan hubungan antarsubsistem (misalnya, penguasaan rezim politik atas organisasi ekonomi, pengendalian keluarga dan keseluruhan kehidupan privat oleh pemerintah totaliter).
6. Perubahan lingkungan (misalnya, kerusakan ekologi, gempa bumi, munculnya wabah atau HIV, lenyapnya sistem bipolar internasional).

Berdasarkan penjelasan diatas, jika dipisahkan menurut komponen dan dimensinya maka perubahan yang terjadi pada masyarakat di Kampung Tanah Merah adalah perubahan komposisi berupa perpindahan (*migrasi*) penduduk dari Kampung Tanah Merah Lama yang letaknya kini menjadi areal eksplorasi BP LNG Tangguh ke lokasi baru Kampung Tanah Merah Baru yang merupakan wilayah adat masyarakat kampung Saengga. Perubahan struktur berupa perebutan kekuasaan dalam menguasai peran-peran penting yang berhubungan dengan *corporate responsibility program* BP LNG Tangguh. Perubahan fungsi berupa penurunan tingkat pendapatan masyarakat sebagai akibat dari kehilangan akses terhadap pemanfaatan sumber daya laut berupa udang tangkap yang menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat. Perubahan batas berupa penggabungan antara masyarakat Tanah Merah dan masyarakat Saengga dalam satu wilayah adat yang didominasi oleh masyarakat Saengga.

Permasalahan mendasar yang terjadi adalah bahwa masyarakat Kampung Tanah Merah saat ini telah mengalami kehilangan sumber mata pencaharian, yang berdampak pada melemahnya kemampuan ekonomi. Penduduk lokal diperhadapkan pada keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagai penyedia kebutuhan hidup sebagai konsekwensi dari resettlement area. Keterbatasan lokasi hunian dan areal berburu serta menangkap udang menjadi penghambat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Oleh sebab itu perlu dikaji ulang consensus antara BP LNG Tangguh dan masyarakat dalam proses resettlement area, sehingga muncul beberapa pertanyaan diantaranya, agaimana proses persiapan Resettlement Area Vilages di Kampung Tanah Merah KabupatennTeluk Bintuni?, Bagaimana implementasi consensus yang dibuat antara BP LNG Tangguh dan masyarakat Tanah Merah?, Bagaimana proses pemilihan lokasi DAV bagi Penduduk Sumuri? dan Bagaimana proses penyerahan serta proses perpindahan penduduk Sumuri dari kampung lama ke kampung baru?

Beberapa pertanyaan diatas tentunya memberikan daya tarik tersendiri bagi penulis sehingga melakukan penelitian ini dengan tujuan agar dapat memberikan masukan kepada berbagai stakeholder guna meluruskan kembali komitmen dari para pihak yang berkepentingan dalam mengeksploitasi

kekayaan sumber daya alam di Telum Bintuni. Selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk mendorong proses empowerment yang dilakukan agar lebih serius dan bersungguh-sungguh dalam memberdayakan masyarakat lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan melihat secara langsung tempat atau objek yang diteliti serta fenomena yang berlangsung di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena atau isu-isu sosiologis yang terjadi di masyarakat dengan hadirnya BP LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni secara khusus terhadap beberapa kampung salah satunya Kampung Tanah Merah sebagai daerah yang terkena dampak langsung eksploitasi BP LNG Tangguh.

Moleong (2016 : 14-17) menyatakan bahwa fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara bebas terbuka dan studi dokumen berupa dokumen LARAP dan AMDAL BP LNG Tangguh.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi

Kabupaten Teluk Bintuni secara geografis terletak di bagian dagu dan leher di kepala burung Provinsip Papua Barat. Secara administratif luas Kabupaten Teluk Bintuni $\pm 18.658 \text{ km}^2$ dengan terdapat 10 distrik. Diantaranya Distrik Bintuni, Distrik Babo, Distrik Aranday, Distrik Mardey, Distrik Tembuni, Distrik Maskona Utara, Distrik Maskona Selatan, Distrik Irarutu, Distrik Idoor dan Distrik Kuri. Diantara 10 distrik juga terbagi dalam 96 kampung yang tersebar dari wilayah pedalaman sampai wilayah pesisir pantai dan daerah aliran sungai.

Secara spesifik dari lokasi penelitian ini adalah dengan mengambil lokasi pada Kampung Tanah Merah Baru Distrik Babo. Luas wilayah Kampung Tanah Merah Baru $\pm 200 \text{ ha}$, dimana secara administratif Kampung Tanah Merah di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Sebiar. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Saengga, di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Onar dan disebelah timur bertarasan dengan Kampung Wimbrow. Kampung Tanah Merah Lama adalah kampung lama yang lokasinya kini menjadi areal site BP LNG Tangguh dan Kampung Tanah Merah Baru adalah wilayah atau daerah dari adanya resettlement area dengan mengambil sebagian wilayah Kampung Saengga untuk dijadikan Kampung Tanah Merah Baru yang ada saat ini.

Secara umum wilayah Teluk Bintuni beriklim tropis monsoon yang dicirikan oleh kondisi suhu dan kelembaban udara yang tinggi sepanjang tahun. Perubahan musim tersebut dicirikan oleh beberapa

mekanisme fisik atmosfer yang menghasilkan angin musiman. Pada masyarakat lokal mendefinikannya sebagai musim angin barat dan musim angin timur. Angin barat akan bertiup dengan membawa kumpulan awan tebal dan hitam sehingga pada musim ini disebut dengan musim hujan dan ombak. Musim ombak umumnya terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret. Sedangkan angin timur akan bertiup dengan menjauhkan kumpulan awan tebal sehingga pada musim ini disebut dengan musim teduh. Iklim ini terjadi sekitar bulan April hingga bulan November. Pada musim teduh juga akan jarang terjadi hujan atau intensitas turunnya hujan menjadi rendah.

Data tahunan berdasarkan BMG Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan bahwa kecepatan angin berkisar dari lambat hingga sedang (8m/detik) dengan frekwensi kejadian kurang dari 20%. Kecepatan angin terbesar umumnya bertiup dari arah barat daya (>15m/detik) namun kejadiannya amat jarang. Suhu udara pada kawasan ini berkisar antara 20° – 38°C. Iklim dan suhu di kawasan Teluk Bintuni juga banyak dipengaruhi oleh banyaknya sungai yang menyebabkan kondensasi pada wilayah tersebut.

Kampung Tanah Merah adalah bagian dari wilayah administratif Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni. Merupakan suatu kawasan dataran rendah, sungai dan delta. Wilayah kampung yang merupakan wilayah pesisir dengan komposisi hutan pantai, hutan mangrove, nipah, dan hutan sagu campuran. Topografi Kampung Tanah Merah Baru dan kemirinagnnya memberikan gambaran tentang morfologi sebagai morfologi dataran bergelombang. Morfologinya jenis ini banyak dijumpai di daerah dataran alluvial pada bagian-bagian yang agak terisolasi yang terbentuk dari endapan sungai. Dengan tingkat kemiringannya berkisar antara 5,0% sampai 10,0% dengan ketinggian relief rata-rata kurang dari 30 meter.

Wilayah yang memiliki akses jalur laut dan transportasi laut menjadi andalan dalam memberikan akses kepada semua aspek kehidupan masyarakat. Kawasan ini di diami oleh suku Sumuri pada bagian selatan Teluk Bintuni dengan pola hidup yang mencirikan masyarakat pesisir (masyarakat maritime) dengan karakter lingkungan alamnya. Mencari ikan, menangkap udang dan pangkur sagu merupakan pola hidup dan aktifitas sehari-hari yang dikerjakan oleh masyarakat adat Suku Sumuri.

Selain bermata pencaharian sebagai nelayan mereka juga melakukan kegiatan lainnya seperti mengambil produk hutan kayu maupun non kayu sebagai pekerjaan lain, meningat wilayah tersebut merupakan wilayah yang sarat dengan pohon merbau yang sedang digarap oleh pemegang HPH oleh PT. Mutiara Tiber Group. Selain kayu, masyarakat juga mengambil sumber daya hutan non kayu seperti sagu sebagai makanan pokok dan daun sagu untuk membuat atap rumbia. Masyarakat juga menggantungkan hidup pada ketersediaan makanan oleh alam baik dari tanaman serta binatang berburu [misalnya, walabi, babi hutan, dll).

3.2 Tahap Persiapan

BP Tangguh sebelum melangkah lebih jauh dalam pembangunan kilang gas di wilayah adat Tanah

Merah perlu mendapat izin dan restu dari masyarakat sebagai pemilik hak ulayat tanah adat. Sehubungan dengan itu maka BP Tangguh perlu mengadakan serangkaian perjanjian dengan masyarakat guna memperoleh izin. Negosiasi tersebut dilakukan dengan marga pemilik hak ulayat dan masyarakat kampung serta BP Tangguh mengenai lokasi Kampung Tanah Merah yang akan dijadikan kilang gas alam cair. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam pertemuan itu adalah (a) menetapkan kepemilikan dan kompensasi yang sesuai untuk pembebasan lahan, (b) manfaat yang akan diperoleh dalam bentuk persetujuan yang akan diberikan, dan (c) untuk menyepakati kompensasi atas kepemilikan sagu dan tanaman produksi pertanian, kehilangan rumah tinggal, dan batas akses yang akan digunakan.

Berdasarkan catatan tersebut kemudian akan di tuangkan kedalam konsensus yang diantaranya (a) perjanjian untuk penggantian atas kehilangan rumah pribadi masyarakat akibat akan dijalankannya proyek BP Tangguh, (b) perjanjian untuk membangun dan mengganti infrasturktur kampung, dan (c) kesepakatan awal mengenai lokasi pemukiman kembali Kampung Tanah Merah Baru. Selain negosiasi diatas, BP Tangguh juga melakukan negosiasi untuk membayar kompensasi terhadap kerugian hasil hutan yang selama ini memberikan penghidupan kepada masyarakat, yaitu kompensasi terhadap tanaman produksi masyarakat.

Tabel. 4. Berikut kronologis tahap persiapan resettlement area Kampung Tanah Merah

Bulan	Uraian	Penjelasan
Mei 1999	Pelepasan lahan untuk tanam LNG dan pemukiman kembali	Negosiasi dengan marga dan masyarakat desa di pembebasan tanah untuk LNG dan pemukiman kembali dan kompensasi untuk klan dan desa. Negosiasi menyebabkan perjanjian (a) untuk menggantikan rumah pribadi (b) perjanjian untuk mengganti dan meningkatkan infrastruktur desa dan pelayanan, dan (c) kesepakatan awal di situs resettlement di Tanah Merah Baru
Maret 2001	Lokakarya resettlement kampung Tanah Merah	Workshop dilakukan untuk menjelaskan beberapa poin dalam resettlement kampung dan kemudian menjaring informasi publik yang akan digunakan dalam perjanjian yang akan dibuat kerangka awal dalam menentukan model hunian dan pembentukan Pemukiman Kembali Tanah Merah Commite
Juli 2001	Penyelesaian model rumah	Kelompok evaluasi model rumah
Oktober 2001	Estabilishment Tanah Merah Komite Pemukiman Kembali	Pembentukan Komite Pemukiman Kembali Tanah Merah
November 2001	Sensus Sosial-ekonomi Tanah Merah	Pelaksanaan Sensus sosial-ekonomi Tanah Merah Penginformasian kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat sensus akan dipakai dalam proses resettlement Tanah Merah
Februari 2002	Lokakarya akhir	Berdasarkan pro dan kontra penduduk Kampung Onar

	penentuan lokasi resettelemt Merah situs	lokasi Tanah	dan Tanah Merah sehingga mereka memilih lokasi yang sesuai dengan yang mereka inginkan
Maret 2002	Sensus Saengga	Kampung	Mencari informasi yang sama menyangkut pembangunan rumah dan infrastruktur pendukungnya.
Agustus 2002	Lokakarya Saengga		Elaborasi dan klarifikasi dari komitmen awal pada bulan Agustus 1999

Sumber : Dokumen LARAP Kampung Tanah Merah

3.3 Konsensus Antara Masyarakat dan Bp LNG Tangguh

a. Kompensasi Terhadap Tanah Adat Sebagai Lokasi Pembangunan Kilang Gas LNG

Perjanjian atau konsensus yang dibuat berdasarkan SK Bupati Kabupaten Manokwari saat itu (Kabupaten Teluk Bintuni sebelum dimekarkan menjadi kabupaten definitive) No 213 Tahun 1997 yang dijadikan sebagai acuan dalam pemberian kompensasi. Dalam surat keputusan tersebut memuat pedoman dalam menunjukkan nilai jual tanah diluar kota kabupaten dan kecamatan. Dalam surat keputusan itu menyebutkan bahwa tanah luar kota kabupaten dan kecamatan dihargai dengan 30 – 50 rupiah/m². Namun kebijakan lain yang dibuat dalam konsensus antara BP Tangguh dan masyarakat bahwa tanah adat masyarakat dihargai dengan 15 rupiah/m².

Konsensus tersebut berisi pembayaran hak ulayat kepada marga Simuna, Wayuri, dan Sowai seluas 3.266 ha yang digunakan untuk pembangunan pabrik LNG. BP LNG Tangguh juga berkewajiban untuk membayar pembebasan 200 Ha lahan di sebelah Kali Saengga guna pemukiman warga yang akan direlokasi. BP Tangguh juga berkewajiban menyediakan sertifikat bagi kepemilikan tanah bagi warga yang dipindahkan ke Tanah Merah Baru dan penduduk Kampung Saengga serta pajak / biaya yang terkait dengan sertifikasi tanah.

b. Kompensasi Terhadap Relokasi Pemukiman Warga dan Pembangunan Fasilitas Umum

Beberapa kesepakatan yang dibuat guna realisasi terhadap kompensasi pembangunan perumahan warga dan fasilitas umum serta pendidikan dibangun diatas lahan seluas 200 Ha bagi 127 KK antara lain persetujuan penduduk untuk pembangunan rumah pengganti dari kayu dan renovasi rumah penduduk Kampung Saengga dan menyediakan sertifikat serta membayar biaya pajaknya, keputusan untuk membentuk komite pemukiman kembali Tanah Merah. BP Tangguh juga berkewajiban menyediakan fasilitas umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, adat dan fasilitas pemerintahan serta keagamaan.

c. Kompensasi Atas Tanaman Produksi Pertanian Masyarakat

Jenis tanaman yang disepakati dalam pembayaran kompensasi adalah tanaman/pohon produksi pertanian seperti buah-buahan dan sagu yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Manokwari

Nomor 213 tahun 1997. Pohon sagu yang ditebang akan dibayarkan Rp. 75 juta/pohon kepada tiap kepala keluarga selama masa rekonstruksi pemukiman warga tahun 2003-2004. Pembayaran akan dilakukan pada saat pohon ditebang, dan disesuaikan dengan log pemotongan dan ukuran pohon yang sudah disepakati dalam konsensus antara BP Tangguh dan masyarakat.

Namun masyarakat masih mengharapkan pembayaran kompensasi terhadap pohon-pohon yang ditebang berkaitan dengan kegiatan proyek yang berjalan. Upaya tuntutan masyarakat itu didukung dengan Keputusan Gubernur Papua tahun 2001, dimana dalam keputusan itu memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat sebagai pemegang hak ulayat. Keputusan itu kemudian mewajibkan perusahaan untuk membayar kompensasi kepada masyarakat adat atas tanah adat menyangkut penebangan pohon dan alih fungsi hutan konservasi.

d. Perjanjian Hak Kelautan

Perjanjian terhadap hak penangkapan ikan didasarkan pada beberapa hal yang menjadi inti dalam perjanjian yang dibuat yaitu ditetapkannya hak ulayat marga yang berbasis hak sumber daya kelautan. Kedua adalah hak warga untuk menggunakan laut sumber daya. Untuk Tanah Merah, hak ulayat masyarakat yang berbasis hak sumber daya laut yang ditetapkan untuk wilayah laut tepat di depan area Kampung Tanah Merah. BP Tangguh akan memberikan kompensasi kepada warga untuk kerugiannya atas pengelolaan sumber daya laut. Sebagai gantinya BP menyediakan motor temple laut, speed boat, ketinting, jaring udang, perahu motor dan beberapa perlengkapan melaut yang dibutuhkan oleh masyarakat.

e. Konsensus Ketenagakerjaan

Dalam konsensus ketenaga kerjaan, antara BP Tangguh dan masyarakat sepakat bahwa setiap satu kepala keluarga berhak atas satu pekerjaan di perusahaan. BP Tangguh juga berkewajiban menyediakan fasilitas training dan pendidikan keahlian bidang MIGAS kepada putra putri dari Kampung Tanah Merah. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan ini untuk mempersiapkan generasi muda Tanah Merah untuk mengisi lowongan satu pekerjaan yang tersedia di dalam proyek BP Tangguh. Hal tersebut dituangkan dalam kontraktornya EPC (*Engineering, Procurement and Construction*) dengan tujuan (1). Memaksimalkan kesempatan kerja dan pelatihan, (2). Membantu meningkatkan kepekaan para pekerja dan hubungan baik dengan masyarakat dan (3). Memastikan bahwa demobilisasi tenaga kerja terlaksana dengan baik pada saat terselesaikannya pekerjaan konstruksi

f. Konsensus Terhadap Kehilangan Mata Pencaharian

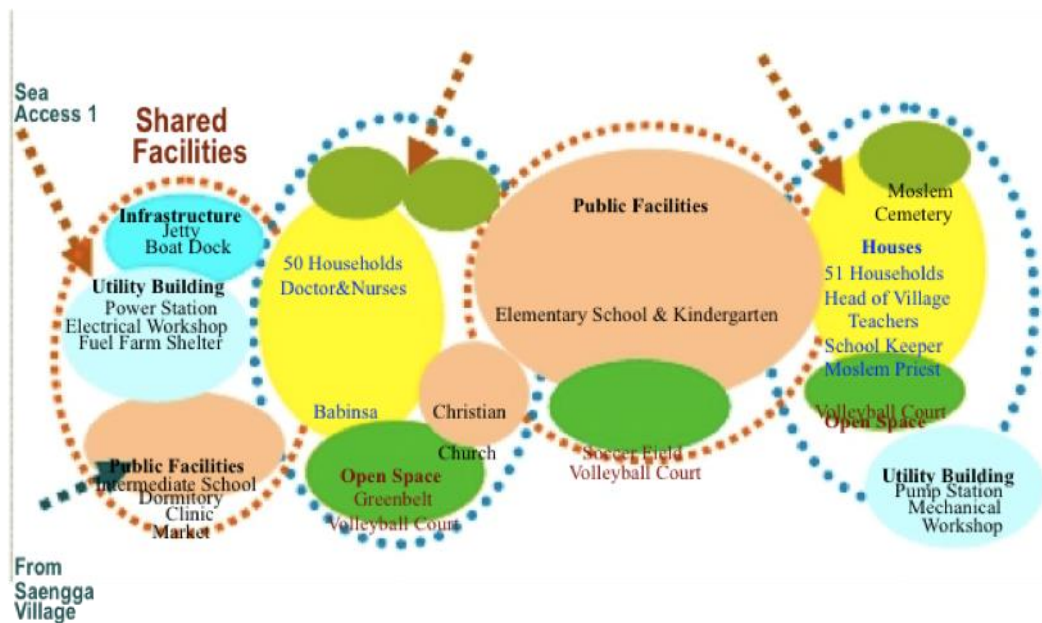
Masyarakat sebelum pindah ke Kampung Tanah Merah Baru bermata pencaharian sebagai nelayan penangkap udang dan juga pertain. Namun petani yang dimaksud disini bukanlah pertanian menetap dengan teknologi bercocok tanam modern namun kegiatan pertanian dengan pola berpindah-pindah.

Proses perpindahan yang lokasi pemukiman menjadi konsekwensi terhadap BP Tangguh untuk membantu pengembangan mata pencaharian pertanian dan non-pertanian. Masyarakat akan difasilitasi oleh BP Tangguh dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan pertanian sebagai peningkatan keahlian dalam sistem pertanian menetap modern.

3.4 Pemilihan Lokasi Kampung Tanah Merah Baru

Proses konsultasi masyarakat dalam merancang tata letak kampung baru di Tanah Merah Baru dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap 1 dengan proses diskusi mempertimbangkan sosial-budaya dan sosio-ekonomi perilaku masyarakat Tanah Merah terkait desain kampung. Tahap 2 tahap perencanaan berdasarkan informasi yang diperoleh pada tahap pertama. Tahap 3 merupakan kesepakatan final mengenai tata letak kampung yang baru (dan persyaratan) dan dituangkan dalam pengaturan upacara tradisional. Pembangunan pemukiman warga dikerjakan oleh PT. BITA selaku kontraktor BP Tangguh dengan dengan 'zonasi konsep' dengan gambar zonasi layout Kampung Tanah Merah Baru.

Gambar. 1. Konsep Zonasi Dimanfaatkan di Desa Layout dan Desain



Sumber : Dokumen LARAP Tanah Merah Baru

Fasilitas penunjang yang disediakan oleh perusahaan diatas lahan dimensi ± 1000m X 1500m di sebelah barat Kampung Saengga dengan posisi kemiringan menghadap ke laut guna menunjang kelancaran kehidupan di Kampung Tanah Merah Baru antara lain jalan kampung (satu ruas jalan dari Sungai Saengga mulai dari ujung timur ke ujung barat kampung). Akses terhadap laut (dermaga laut yang dibuat sebagai areal bagi masyarakat untuk mengakses laut). Perumahan (disediakan 127 rumah

tinggal keluarga dengan 54 cadangan rumah yang disediakan sebagai rencana perluasan kampung). Pusat pemukiman dan vasilitas pendukungnya yaitu awasan pusat pemukiman masyarakat meliputi kediaman kepala desa pemerintah, balai desa, kantor koperasi, bangunan-bangunan publik seperti bangunan ibadah (yaitu, gereja, masjid). Juga terdapat lapangan olah raga (yakni, lapangan sepak bola dan lapangan voli) dan juga bangunan lain semisalnya, pasar, dan daerah terbuka di tempat lain di seluruh desa.

3.5 Penyerahan Dan Penempatan Masyarakat Di Lokasi Kampung Tanah Merah Baru

Tim Pemukiman Kembali terus mempersiapkan diri dan segala hal penting yang dibuthkan untuk pindah. Beberapa hal pokok yang difokuskan oleh tim ini sebagai tahap persiapan adalah :

1. Perencanaan, penjadwalan dan memfasilitasi pelaksanaan upacara adat sebagai tanda keberangkatan dari Tanah Merah. Upacara adat ini juga sekaligus disertai dengan upacara keagamaan (Kristen dan Islam) sebagai tanda dilakukannya atau diangkutnya barang-barang serta perabor rumah ibadah untuk dipindahkan ke kampung baru.
2. Memfasilitasi dan melakukan kunjungan awal yang diwakili oleh pemerintah daerah dan satu pengamat independen ke lokasi kampung yang baru dibangun.

Pada tahun 2004, Tim Pemukiman Kembali menetapkan waktu antara 27 Juni sampai 8 Juli 2004 adalah sebagai tenggat waktu bagi pelaksanaan perpindahan masyarakat Kampung Tanah Merah dan diumumkan kepada masyarakat tanggal pelaksanaan perpindahan kampung yang difasilitasi BP Tangguh. Proses awal pemindahan masyarakat dilakukan dengan mendistribusi bahan makanan dan perabot rumah tangga. Kenyataannya pada saat petunjuk praktis tentang pelaksanaan pemindahan banyak hal yang berubah dan mulai terungkap. Perubahan perpindahan dan kendala yang menghambat proses relokasi adalah pada pemahaman masyarakat mengenai sistem yang diterapkan sehingga perubahan atau keterlambatan tersebut menjadikan Tim Relokasi melakukan penataan ulang sistem perpindahan yang diterapkan. Target yang ditetapkan untuk pemindahan perabot rumah tanggal adalah dua hari disamping perhitungan kendala yang terjadi pada kerusakan LCTs. Walau proses pemindahan ini mengalami beberapa masalah namun semuanya dapat di atasi dan proses pemindahan masyarakat ini berlangsung dengan aman dan terkendali.

Dalam proses relokasi ini juga BP Tangguh tetap berkomitmen untuk menyediakan paket jatah makan bagi setiap rumah tangga selama proses perpindahan penduduk sampai satu tahun. Tercatat dua minggu sekali diadakan pendistribusian barang-barang kebutuhan rumah tangga (daging, sayuran, dan buah-buahan), ini dimulai satu minggu setelah proses pemindahan dan dilanjutkan selama 6 bulan pertama. Setelah masyarakat dipindahkan, kemudian mereka kembali ke kampung lama untuk membongkar seluruh bahan bangunan atau tanaman atau apapun yang ingin di bawah pindah ke

kampung baru. Akhir pembongkaran sisa-sisa bangunan di Kampung Tanah Merah Lama dilakukan oleh BP Tangguh pada bulan Agustus 2004. Sebagai tanda diakhirinya semua proses relokasi penduduk Kampung Tanah Merah dilakukan dalam sebuah upacara pada tanggal 17 Juli 2004 yang dihadiri oleh Pemerintah Papua dan Kabupaten Teluk Bintuni.

3.6 Perubahan Sistem Sosial Ekonomi

a. Kegagalan Transformasi pada Sektor Nelayan

Keberadaan BP LNG Tangguh di Teluk Bintuni secara khusus bagi masyarakat Kampung Tanah Merah membawa dampak lain yang tidak signifikan terhadap perubahan nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Bila dibandingkan antara kondisi di kampung lama dan kampung baru maka dapat dipastikan bahwa kondisi yang dihadapi oleh masyarakat sangat jauh berbeda.

Dikampung lama masyarakat sehari-harinya bekerja sebagai nelayan penangkap udang, dan biasanya untuk mengakses jalur penangkapan udang sangatlah mudah. Namun setelah pindah ke kampung baru, udang yang biasanya didapat hanya dengan mendayung 100 meter ke depan kampung sudah sangat sulit untuk di dapat. Bahkan masyarakat untuk mengakses laut sebagai sumber mata pencaharian sudah sangat terbatas. Kondisi ini sangat menyulitkan kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Untuk sekali melaut di kampung lama mereka tidak membutuhkan biaya besar untuk pergi melaut. Karena peralatan yang digunakan juga tidak terlalu memberatkan masyarakat secara finansial. Peralatan yang digunakan adalah sampan (perahu) dan jaring udang, tetapi ada juga beberapa nelayan yang menggunakan ketinting (sejenis mesin penggerak perahu motor). Di kampung lama untuk satu mesin motor tempel hanya memerlukan biaya Rp. 18.000 untuk sekali melaut. Artinya biaya operasionalnya mudah untuk dijangkau entah menggunakan perahu dayung maupun perahu motor.

Memang dalam penerapan perjanjian resettlement area village antara BP Tangguh dan masyarakat ada pemberian kompensasi berupa motor tempel dan jaring sebagai sarana yang dipakai untuk menangkap udang. Tetapi di lain sisi perlengkapan itu tidak memberikan manfaat yang signifikan terhadap perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya terhadap peningkatan standar ekonomi antara Kampung Tanah Merah Lama dan Kampung Tanah Merah Baru.

Di kampung baru mereka harus mengeluarkan biaya 6 kali lipat dari pengeluaran bila di banding dengan di kampung lama. Sedangkan untuk menangkap udang saja sudah sangat susah dan kalaupun mereka mendapat udang, untuk memasarkan udang-udang itu sudah mengalami kesulitan. Sebab

perusahaan yang dulunya sebagai pembeli hasil tangkapan udang sudah tidak ada lagi. Walaupun hasil tangkapan banyak tetapi tetap saja masyarakat merugi sebab biaya pengeluaran lebih besar dari hasil tangkapan.

b. Kegagalan Transformasi di Bidang Pertanian

Salah satu dari beberapa kegagalan transformasi budaya masyarakat Kampung Tanah Merah adalah di bidang pertanian. Kondisi saat ini di Kampung Tanah Merah Baru tidak sama dengan ketika mereka masih tinggal di kampung lama. Di kampung baru mereka mengalami *shock culture* akibat transformasi yang di paksakan. Masyarakat secara budaya belum siap dengan perubahan yang terjadi secara mendadak. Di kampung baru mereka diperhadapkan dengan sistem dan pola budaya baru dalam sistem sosial.

Apabila dibandingkan dengan kehidupan di kampung lama, maka mereka kadang-kadang berkeinginan untuk kembali ke kampung lama. Tetapi hal itu sudah tidak mungkin terjadi sebab wilayah yang mereka tinggal sudah berubah menjadi LNG site. Sebab bagi penduduk Tanah Merah tinggal di kampung lama lebih baik dibanding tinggal di kampung baru. Di kampung lama mereka mempunyai lahan untuk berladang yang cukup luas bahkan kepemilikannya bisa 3 – 4 kapling lahan pertanian. Selain itu juga banyak lokasi dan tanaman sagu yang banyak.

Sedangkan di kampung baru untuk lahan perladangan saja sudah terbatas dan mereka mengalami kesulitan dalam memangkur sagu. Untuk bercocok tanam pun sangat tidak memungkinkan sebab struktur, jenis dan tingkat kesuburan tanah di Tanah Merah Baru tidak cocok untuk perladangan. Karena sudah terbiasa dengan sistem pertanian di kampung lama dengan pola pertanian berpindah dan sekarang diperhadapkan dengan sistem pertanian menetap sehingga membuat mereka tidak dapat mengelola ladang. Ini disebabkan karean mereka tidak memiliki *skill* dalam kegiatan perladangan menetap.

Memang dalam implementasi setiap perjanjian antara BP Tangguh dengan masyarakat bahwa mereka akan menerima kompensasi atan kerugian mereka. BP juga memberikan bantuan berupa peralatan pertanian dan mengirim orang untuk mengikuti pelatihan teknik pertanian di IPB Bogor tetapi tetap tidak membantu masyarakat dalam kegiatan pertanian mereka. Namun dalam impikasinya masyarakat tidak dapat menjalankan sistem pertanian dengan pola menetap.

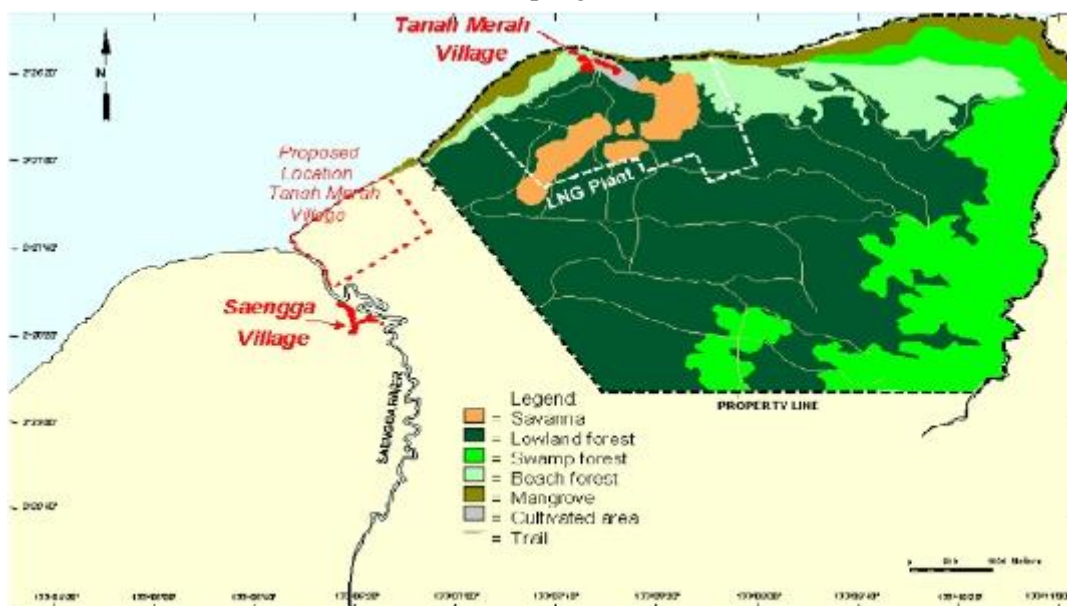
Masyarakat lebih banyak menanam tanaman yang tidak memerlukan proses penanaman dan pemeliharaan dengan pola dan teknik modern. Mereka hanya membersihkan rawa-rawa di pinggiran kampung dan kemudian menanam sayur kangkung. Walau hasil panen kangkung banyak tapi pasar di Tanah Merah Baru sepi. Memang antara BP Tangguh dan masyarakat sepakat bahwa tiap minggu akan dibeli hasil pertanian masyarakat 100 kg. Namun dalam kenyataannya kesepakatan itu tidak terlaksana, banyak hasil panen sayur kangkung yang tidak terbeli dan dibiarkan sampai membusuk.

Masyarakat kini sudah tidak dapat melakukan kegiatan perladangan seperti yang mereka kerjakan di kampung lama. Mereka sudah tidak mempunyai akses yang luas terhadap pengolahan tanah. Untuk berkebun saja mereka sudah tidak bisa apalagi mereka harus berdagang dan membuka kios. Memang ada beberapa keluarga yang saat ini memulai usaha kios, tetapi yang dipertanyakan apakah itu akan terus bertahan? Sebab pada kenyataannya mereka masih juga mengalami kesulitan dalam suplay barang.

Sedangkan keluarga lain tidak dapat melakukan aktifitas ekonomi lain yang dapat menopang kehidupan keluarga. Mereka terancam kehilangan pekerjaan sehingga mereka terbelit secara ekonomi. Kadang mereka ingin kembali ke kampung mereka yang lama tetapi hal itu sudah tidak mungkin lagi. Yang ada saat ini mereka tetap bertahan dengan bergantung pada lahan terbatas yang didiami.

Keterbatasan Lahan dan Security Guard

Gambar. 2. Peta Kampung Tanah Merah Baru



Sumber : Amdal BP Tangguh

Berdasarkan peta tergambar cakupan wilayah yang memberikan batasan antara BP LNG site dan Kampung Tanag Merah Baru. Areal yang berwarna hijau adalah wilayah yang dijadikan sebagai LNG site are. Garis putih putus-putus ada LNG plant areal dan garis hitam adalah batas *property line*. Luas cakupan LNG property adalah sebesar 3.266ha. Sedangkan yang bergaris merah putus-putus adalah lokasi Kampung Tanah Merah baru. Antara Kampung Tanah Merah baru dan LNG site terdapat lahan kosong berjarak kira-kira 2 kilo meter.

Wilayah atau kampung dalam pandangan orang Tanah Merah adalah sebagai tempat mereka hidup dan tinggal serta bekerja. Kampung sebagai lahan dimana mereka bekerja mencari nafkah/mata pencaharian baik sebagai nelayan maupun sebagai petani peramus sagu dan perkebunan berpidah-pindah. Menangkap udang, pangkur sagu, berburu hewan liar seperti babi hutan dan kasuari adalah bagian dari kehidupan mereka. Kini mereka sudah tidak lagi memiliki pola kehidupan yang sudah dijalani bertahun-tahun. Semua hal itu sudah tersimpan dan menjadi sebuah kenangan di kampung lama. Disini dikampung baru mereka harus memulai satu pola budaya baru yang mereka sendiri belum siap untuk menerimanya.

Keterbatasan itu berada pada tata letak Kampung Tanah Merah Baru yang diapit oleh Kampung Saengga dan site LNG Tangguh. Pada sektor perikanan (Nelayan) masyarakat sudah dibatasi untuk tidak melakukan kegiatan nelayan di dalam atau sekitar dekat batas areal site BP Tangguh. Walaupun perusahaan telah memberikan kompensasi kepada masyarakat untuk nelayan, tetapi tetap saja mereka mengalami kesulitan dalam aktifitas mereka sebagai nelayan. Sebab untuk menjangkau wilayah tangkapan udang mereka akan dicegah oleh security yang mengamankan lokasi tangkapan udang. Sebab lokasi tangkapan udang memang berada di dalam areal site LNG.

Jalur pelayaran di wilayah Teluk Bintuni menjadi sangat terbatas, sebab didalam dasar laut terbentang beberapa pipa gas yang terbentang dari utara ke selatan teluk. Keterbatasan ini bukan hanya berlaku bagi masyarakat Tanah Merah saja tetapi untuk semua jenis pelayaran yang akan melewati Teluk Bintuni. Hutan-hutan bakau yang menjadi ekosistem penyimpan potensi sumber daya laut berupa ikan dan kepiting juga turut di proteksi oleh keamanan perusahaan. Segala potensi sumber daya laut menjadi sulit untuk diakses sehingga masyarakat sudah pasrah dengan kondisi itu.

Sedangkan untuk alternatifnya masyarakat di arahkan untuk mengganti pekerjaan sebagai nelayan dengan pekerjaan sebagai petani perladangan menetap. Masyarakat sudah terbiasa dalam satu pola budaya yang lama dan mereka harus menerapkan pola budaya baru. Ini yang dikategorikan sebagai migrasi terpaksa, sebagai imbas dari masuknya sebuah kepentingan ekonomi kapitalis. Di Tanah Merah Baru sangat berbeda jauh ketika mereka masih di Tanah Merah Lama.

Perbedaannya bahwa di Tanah Merah Lama mereka mempunyai kapling untuk perladangan cukup luas dan bisa lebih dari satu kapling. Pengelolaannya pun dilakukan secara bersama-sama dalam satu kelompok marga. Tetapi di Tanah Merah Baru mereka tidak mendapat kompensasi seperti yang mereka miliki di Tanah Merah Lama. Di kampung baru mereka hanya mempunyai lahan sempit dan terbatas dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan rumah tangga masing-masing.

Kapling tanah yang di sediakan sebagai lokasi bagi Kampung Tanah Merah baru adalah seluas 200 Ha adalah tanah adat marga Soway di Kampung Saengga. Dengan luas 200 Ha itu kemudia 100 Ha di jadikan sebagai pemukiman warga dan 100 Ha digunakan sebagai lahan pertanian bagi masyarakat. Sedangkan bila dibandingkan dengan kampung lama luas wilayah mereka jauh lebih luas di kampung lama dari kampung baru. Sempitnya lahan kampung dan perkebunan masyarakat ini dirasakan sebagai penghambat bagi masyarakat dalam aktifitas perekonomian. Mereka tidak mempunyai ruang gerak yang bebas dan luas dalam penerapan pola mata pencaharian.

Dampak terburuk dari keterbatasan wilayah ini berujung pada kehilangan sejumlah pekerjaan atau lapangan usaha yang mereka sudah jalani. Kini mereka tinggal dalam kondisi yang tidak pasti dan bingung dalam memecahkan persoalan mereka. Kondisi inipun berlanjut hingga pada bidang pendidikan, hampir selama 6 bulan terakhir di tahun 2010 anak-anak usia sekolah di Tanah Merah Baru tidak bersekolah. Pada sektor kesehatan, masyarakat mengalami krisis pangan yang sangat berpengaruh terhadap pemenuhan asupan gizi keluarga. Secara ekonomi mereka sudah tidak mempunyai kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Pengamanan oleh TNI dan POLRI hanya sebagai perisai pelindung perusahaan dalam menolak suku-suku disekita proyek perusahaan yang datang untuk menuntut hak-hak mereka. Kasus-kasus ini seperti yang sering terjadi di areal pertambangan PT Freeport McMoran. Namun berbeda dengan sistem pengamanan yang diterapkan oleh BP Tangguh. Manajemen BP Tangguh mengusahakan suku-suku yang berada disekitar areal eksplorasi untuk terlibat secara maksimal dalam pengamanan aset perusahaan. Tetapi sistem pengamanan ini tetap juga menyimpan potensi konflik. Namun konflik yang beroptensi terjadi bukan antara masyarakat dengan aparat kemanan tetapi konflik budaya antara sesama masyarakat penduduk sebagai pemilik hak ulayat.

Untuk melindungi aset BP senilai \$600 miliar, melalui program CSRnya menerapkan sistem pengamanan berbasis masyarakat. Program ini seluruhnya bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan mendorong masyarakat lokal dalam pembagian tugas-tugas pengamanan. Karena dalam pandangan BP Tangguh hal ini akan sangat mengurangi resiko terhadap pelanggaran HAM dibandingkan dengan menggunakan keamanan militer.

Di setiap perbatasan di siagakan security yang menjaga keamanan lokasi perbatasan antara perusahaan dan Kampung Tanah Merah. Security yang didisagakan akan berpatroli selama 1 kali 24 jam untuk memastikan setiap wilayah LNG dalam keadaan dan kondisi aman. Ada sekuriti yang mengamankan wilayah laut dan ada juga yang mengamankan wilayah darat pada pagar-pagar pembatas.

Tujuan dilaksanakannya sistem pengamanan berbasis masyarakat adalah untuk menciptakan suasana kemitraan antara BP Tangguh dan masyarakat. Pos-pos keamanan pada semua gerbang masuk ke aset-aset utama proyek akan dibuat tahan segala cuaca dan dilengkapi dengan sarana komunikasi yang memadai, pencahayaan di dalam dan di bagian luar pos, dan ruang terbuka yang cukup untuk empat orang penjaga memandang ke segala arah dan dapat dioperasikan 24 jam sehari.

4. KESIMPULAN

Secara garis besar hal-hal pokok yang tertuang dalam konsensus antara BP Tangguh dan masyarakat adalah Kompensasi Terhadap Tanah Adat Sebagai Lokasi Pembangunan Kilang Gas LNG dan sebagai gantinya BP LNG Tangguh berkewajiban untuk menyediakan lahan baru dan merelokasi warga Kampung Tanah Merah ke lokasi baru yang telah disediakan. BP LNG Tangguh juga bertanggungjawab untuk membayar kompensasi terhadap tanaman produksi pertanian dan sumber daya laut dan sebagai gantinya disediakan areal lokasi pertanian dan pelatihan pertanian serta penyediaan lapangan kerja di pada perusahaan.

Walaupun BP LNG Tangguh tidak sepenuhnya menjalankan konsensus yang dibuat dengan masyarakat namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guna mengurangi permasalahan yang terjadi sebagai dampak resettlement area village adalah penyediaan lahan pertanian yang baik serta menyediakan pasar bagi pemasaran hasil pertanian. BP LNG Tangguh dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang terkena dampak eksplorasi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armida S Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas (Info KUKM, edisi 43, tahun 4 Oktober 2011).
- Alan Gilbert & Josef Gugler, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, Penerbit Tirta Wacana, Yogyakarta 2007.
- Antonius Tarigan, *Konsep & Urgensinya Dalam Memperkuat Pembangunan Desa*, Kelembagaan Kerjasama Pembangunan, Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, Meneg PPN/Bappenas
- Armida S Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas (Info KUKM, edisi 43, tahun 4 Oktober 2011).
- David Jary & Julia Jary, *Collins Dictionary of Sociology*, Harper Collins Publisher, Great Britain 1991.
- Decky Wamena, *Community Development Berbasis CSR di Papua*, SASAKO Papua Publisher Papua Institute, Manokwari Papua Barat 2011.
- Frans Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, 1999.
- George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Kreasi Wacana, Yogyakarta 2009.
- Kartika Listariana, *Mengembangkan Papua yang Kaya*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta 2011.

- Max Weber, *Essay in Sociology*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2009.
- Nicholas Abercrombie, Stephen Hill & Bryan S. Turner, *Kamus Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010.
- Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemua*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Penerbit Prenada, Jakarta 2004.
- Raharjo, *Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2004.
- Sunyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*, Penerbit Centre for Indonesian Research and Development (CIRED), Yogyakarta 2004.
- , *Sosiologi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Suwarsono & Alvin Y. So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan Teori-Teori Modernisasi, Dependensi dan Sistem Dunia*, Jakarta 1994.
- Tatang M. Amrin. Drs, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajs Grafika Persada, Jakarta 2011.

Jurnal :

- Firman Setiawan, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Kepulauan Raja Ampat Secara Terpadu dan Berkelanjutan* Progam Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran.
- Habibullah, *Pemanfaatan Lahan dan Sumber Daya Alam dalam kerangka Pembangunan Masyarakat Desa Sekitar Hutan di Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12 No. 02, Mei – Agustus 2007.
- LPF Team members: (San Afri Awang, Herry Purnomo, Wahyu Wardhana, Philippe Guizol, Patrice Levang, Soadun Sitorus, Nawa Murtiyanto and Yuli Susanto), *LPF Implementation in South Sumatra Country Report Outline, Levelling the Playing Field: Fair Partnership for Local Development to Improve the Forest Sustainability in Southeast Asia Sponsored by European Commission (EC) under the Tropical Forests Budget Line*.
- Marcus J. Pattinama, *PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS DI PULAU BURU-MALUKU DAN SURADE-JAWA BARAT)*, *Jurnal MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 13, NO. 1, JULI 2009: 1-12*
- Rara Ririn Budi Utaminingtyas, *Mengembangkan Perekonomian Daerah sebagai Upaya Mengatasi Masalah Urbanisasi*, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 11 No. 3, Desember 2011.
- Toton Witono, *Kemiskinan dan Lingkungan dalam kerangka Otonomi Daerah, Studi Kasus di Lereng Gunung Merapi Magelang Jawa Tengah*, *jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12 No. 02, Mei – Agustus 2007.
- <http://sorongkota.bps.go.id/Templates/kota.php>